

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman di dalam menafsirkan maksud dari skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat secara Mandiri melalui Usaha Konveksi Amalia, di Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman" ini, maka penulis perlu untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi tersebut :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - a. Pemberdayaan

Secara etimologis, Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti berkekuatan, bertenaga, jalan, ikhtiar.¹

Menurut Pranaka dan Vidyandika dalam artian sempit pemberdayaan berkaitan dengan sistem pembelajaran, sedangkan dalam artian luas pemberdayaan adalah sebagai sebuah konteks aktualisasi diri atau pengembangan diri yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan individu.²

Sedangkan menurut Esrom Aritonang Pemberdayaan adalah usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia agar membela dirinya.³

¹ W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 233.

² A.M.W. Pranaka dan Vidyandika, *Pemberdayaan (Empowerment)*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 71-72.

³ Esrom Aritonang dkk, *Pendamping Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001), hlm. 9.

Pemberdayaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai sebuah upaya untuk memberi dan menumbuhkan kemampuan atau jalan kepada masyarakat agar bisa hidup secara mandiri serta mempunyai skill untuk mengembangkan potensi masyarakat.

b. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat (masyarakat) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya di daerah setempat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan keluarganya dan masyarakat.⁴

Jadi yang dimaksud pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam skripsi ini adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat di dalam kegiatan ekonomi yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya di daerahnya setempat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, keluarganya dan masyarakatnya demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan.

2. Secara Mandiri

Dengan kekuatan sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain.⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud mandiri adalah dengan

⁴ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. iv.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Depdikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 555.

kekuatan, kemampuan, dan kekayaan serta sumber daya, atas kerja dan skill yang dimiliki masyarakat tanpa harus menggantungkan kepada pihak lain (pemerintah).

3. Usaha

Usaha adalah kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai satu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.⁶

4. Konveksi Amalia

Kegiatan yang bergerak di bidang pembuatan pakaian jadi⁷ yang berlogo atau bermerk Amalia.

5. Dusun Mlangi

Dusun Mlangi adalah sebuah dusun yang terletak di desa Nogotirto, salah satu desa yang terdapat di kecamatan Gamping kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Penegasan judul skripsi di atas maka yang penulis maksudkan dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat secara Mandiri melalui Usaha Konveksi Amalia di Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman adalah penelitian mengenai proses kebudayaan ekonomi masyarakat yang menyangkut tentang modal, bahan baku, ketrampilan (skill), produksi dan jaringan pemasaran di usaha konveksi Amalia yang dilakukan oleh pengusaha, karyawan dan masyarakat secara mandiri di dusun Mlangi, desa Nogotirto,

⁶ *Ibid.*, hlm. 997.

⁷ *Ibid.*, hlm. 998.

kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan Negara adalah ketika krisis moneter mengguncang bangsa kita pada pertengahan tahun 1997, pada saat itu pula berbagai krisis-krisis yang lain muncul secara serentak sampai bertumpuk-tumpuknya berbagai persoalan. Salah satu contoh yang riil di masyarakat kita adalah terjadinya krisis ekonomi. Musibah ini mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran menjadi meningkat pesat. Ekonomi rakyat yang notabene mayoritas penduduknya didominasi umat Islam semakin terpuruk. Tentu saja kondisi yang demikian menuntut adanya jalan keluar atau resolusi yang berupa sikap hidup yang sederhana dan produktif.⁸

Dampak dari krisis ekonomi berujung pada persoalan-persoalan dari berbagai aspek, sehingga mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial, budaya, dan politik maupun persoalan-persoalan lainnya. Salah satunya adalah munculnya gerakan-gerakan demokrasi, perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), desakan diberlakukannya otonomi daerah, desentralisasi dan berbagai gerakan-gerakan pemberdayaan ekonomi, sosial dan politik, baik yang diinisiasi oleh

⁸ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, (Bandung: Rosda, 2001), hlm. 69.

lembaga swadaya masyarakat (LSM), individu-individu maupun pemerintah melalui program-program penanggulangan dampak sosial dari krisis ekonomi.⁹

Angka pengangguran akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan baik yang besar, sedang (menengah) dan kecil yang terpuruk dalam pengadaan faktor produksi menimbulkan kemiskinan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Secara otomatis tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa ini adalah tingkat kesenjangan ekonomi yang terlampau lebar serta tingkat kemiskinan yang terlampau memprihatinkan. Krisis multi dimensi yang secara sukses mengantarkan bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa termiskin di dunia. Untuk itu upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi hal yang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi.¹⁰

Upaya memberdayakan yang selama ini kita kenal adalah dengan memberikan bantuan uang, yang itu bukanlah segalanya. Banyak proyek-proyek inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa, yang itu justru mematikan swadaya masyarakat. Bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan uang atau bantuan proyek kepada masyarakat desa tidak akan merangsang dan

⁹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 130.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 131.

menumbuhkan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.¹¹

Pemberdayaan ekonomi rakyat mutlak menghendaki koreksi yang fundamental dalam hubungan ekonomi yang ada sekarang di Indonesia dalam rangka suatu reformasi sosial yang mendasar. Selama ini tidak dilakukan maka kehidupan ekonomi rakyat akan mengalami suatu proses involusi yang semakin lama semakin parah. Bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah bersifat bantuan *sinterklas* yang tidak berhasil meningkatkan posisi ekonomi rakyat ke posisi yang lebih tinggi. Secara substansial selama belenggu-belenggu struktur terus menghadangnya dalam suasana dialektik hubungan ekonomi yang ada, yang seperti kita ketahui bersifat eksploratif.¹²

Dengan demikian, upaya pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat, perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan struktural. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam konstelasi perekonomian nasional. Perubahan struktur ini, bisa dari proses perubahan dan pola ekonomi tradisional ke arah ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi substansi ke ekonomi pasar, dari

¹¹ Magatas Tampubolon, dalam makalahnya yang berjudul *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*, 2000, hlm. 8.

¹² Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 261.

ekonomi ketergantungan ke ekonomi kemandirian, dari ekonomi konglomerat ke ekonomi rakyat.

Menurut Mubyarto, ekonomi rakyat dewasa ini berada di persimpangan jalan. Potensinya untuk berkembang semakin terbuka. Karena seluruh bangsa sangat menyadari mutlak perlunya pemerataan sebagai pra kondisi perwujudan keadilan sosial. Artinya ekonomi rakyat kecil yang selama ini *tergusur* atau tertekan perlu benar-benar digarap dan dilembagakan.¹³ Jika selama ini pembangunan yang dilakukan cenderung terformalisasi. Karena segala sesuatunya telah ditetapkan dan diatur dari *atas*, maka dalam pembangunan yang memihak rakyat menuntut semua perencanaan, keputusan dan pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat sendiri.¹⁴

Dengan konsekuensinya, lembaga-lembaga LSM (Lembaga Swadaya masyarakat atau lembaga non pemerintah) harus lebih diberi tempat untuk berkiprah dalam proses pembangunan sekaligus lembaga LSM ini diperlukan sebagai alternatif atau prototip gerakan, yang akan membangun atau memberdayakan masyarakat. Oleh sebab itu sudah seharusnya masyarakat menerima LSM sebagai patner dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat (rakyat).

Sedangkan untuk mengatasi kejatuhan ekonomi yang sudah porak poranda ini, banyak dari warga masyarakat kita yang produktif,

¹³ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 21.

¹⁴ Ahmad Erani Yustika, *Industrialas Pinggiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 246.

berinisiatif untuk memberdayakan dan berusaha menciptakan usaha sendiri tanpa berharap banyak kepada pemerintah. Salah satu warga masyarakat yang berusaha menciptakan usaha secara mandiri adalah Bapak Zidnuri dan Ibu Dasrokhah.¹⁵ Dari menekuni usaha konveksi tersebut, Bapak Zidnuri dan Ibu Dasrokhah telah mempunyai tiga puluhan orang karyawan yang bekerja pada usaha konveksinya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat secara mandiri yang dilakukan konveksi Amalia ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dusun Mlangi yang dilakukan oleh usaha konveksi Amalia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan (berarti) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat secara mandiri didalam memperkaya referensi dan

¹⁵ Keduanya berasal; dari dusun Mlangi, beliau berdua pasangan suami isteri yang sejak tahun 1993 merintis dan menekuni sebuah usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi).

khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang pengembangan masyarakat Islam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam wirausaha merintis dan mengembangkan usaha konveksi.

E. Kerangka Teoritik

1. Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Pranaka dan Vidyasindika, konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif dan efisien secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional maupun internasional, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan sebagainya.¹⁶

Fakta empiris menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat sebagaimana upaya dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin dapat terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi merupakan fakta yang bersifat *tersentralisasi*, sedangkan pemerataan pembangunan sosial bersifat *terdistribusi* untuk semua masyarakat. Seperti halnya konsep top-down yang dianggap sebagaimana

¹⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 48.

paradigma pembangunan konvensional, sebaliknya model-model pembangunan sosial yang bersifat *bottom-up* dengan strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat, lebih relevan dengan kenyataan di lapangan. Walaupun pada akhirnya, konsep *top down* tidak menyentuh kehidupan masyarakat luas, tetapi *bottom-up* juga tidak akan menjadi pijakan pembangunan satu-satunya karena keinginan yang ada di masyarakat sangat banyak dan bervariasi.

Menurut Harry Hikmat, upaya alternatif dalam bukunya yang diberi judul *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, resolusi terhadap persoalan di atas adalah adanya kemauan dan kesungguhan untuk mengintegrasikan antara konsep pengorganisasian komunitas dan pengembangan komunitas sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Menurutnya dalam konsep tersebut dapat digabungkan menjadi konsep baru yang disebut sebagai *community building*, yaitu konsep yang menjalankan fungsinya sebagai pengembangan sekaligus pengorganisasian masyarakat secara bersamaan dan bersinergi.¹⁷

Empowerment atau Pemberdayaan dalam istilah bahasa Indonesia merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan aliran pemikiran masyarakat dan kebudayaan barat, utamanya Eropa dan Amerika. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep tersebut telah

¹⁷ *Ibid.*, (hlm. 63).

begitu meluas diterima dan dipergunakan, mungkin dengan pengertian dan persepsi yang berada satu dengan yang lainnya. Penerimaan dan pemakaian konsep tersebut secara kritikal tentulah meminta kita mengadakan telaah yang sifatnya mendasar dan jernih.¹⁸

Dalam prosesnya, *Empoverment* (Pemberdayaan) mengandung dua kecenderungan. Pertama, adalah kecenderungan primer yaitu, pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu supaya menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, adalah kecenderungan sekunder yaitu, pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses musyawarah atau dialog.¹⁹

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) baik melalui pendidikan formal maupun non formal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan

¹⁸ Onny S. Prijono dan A.M.W Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, CSIS, 1996), hlm. 44.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

untuk mendidik masyarakat agar mampu berkembang dan mendidik mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Adapun menurut *United Nation*, usaha untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui proses-proses pemberdayaan sebagai berikut:

a. *Getting to Know the Local Community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (local) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat, diperlukan timbal balik antara petugas dan masyarakat.

b. *Gathering Knowledge about the Local Community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi yang mengenai masyarakat setempat, pengetahuan tersebut merupakan informasi factual tentang distribusi penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, tingkat pendidikan, status ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual, jenis pengelompokan serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

c. *Identifying the Local Leaders*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan atau tokoh-

tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, *factor the local leaders* harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

d. *Stimulating the Community to Realize that it has Problems*

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adapt kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu masyarakat perlu pendekatan persuasive agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

e. *Helping People to Discuss Problems*

Memberdayakan masyarakat bermakna, merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

f. *Helping People to Identify their most Pressing Problems*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan yang harus diutamakan pemecahannya.

g. *Fostering Self Confidence*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk mandiri dan berswadaya.

h. *Deciding on a Program Action*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan, program action tersebut itu perlu ditetapkan menurut skala minoritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tertinggilah yang didahulukan pelaksanaannya.

i. *Recognition of Strength and Resources*

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

j. *Helping People to Continue to Work on Solving their Problems*

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

k. *Increasing Peoples Ability for Self Help*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah timbulnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu memenuhi dan menolong dirinya sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.²⁰

²⁰ Magatas Tampubolon, dalam makalahnya yang berjudul *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*, hlm. 7-9.

Sedangkan menurut Kartasasmita, upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa sikap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat (masyarakat) berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dari sarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat paling bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan. Dalam memberdayakan rakyat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber vital kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.

Ketiga, memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan-kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.²¹

2. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi rakyat adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat harus berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendominasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya.

Upaya pengeralahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian,

²¹ Onny S. Priyono dan A.M.W Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, CSIS), hlm. 105-106.

rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

Menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.²²

²² Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, hlm. 37.

Ekonomi Kerakyatan sesungguhnya adalah ungkapan dari demokrasi ekonomi (*economy democracy*). Dengan pengakuan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, para penyusun UUD 1945 secara resmi menggeser isu ekonomi rakyat (*peoples economy*) menjadi ekonomi kerakyatan (*people centered economy*). Sasaran utama dari ekonomi kerakyatan adalah dihapuskannya stratifikasi status ekonomi masyarakat baik berdasarkan ras atau suku bangsa, maupun dari modal atau tingkat penguasaan faktor-faktor produksi.²³

Mekanisme dalam sistem ekonomi kerakyatan pada prinsipnya tetap didasarkan pada mekanisme pasar. Tetapi sejalan dengan amanat penjelasan pasal 3 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dalam sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan untuk mendorong perwujudan demokrasi modal atau penguasaan faktor-faktor produksi. Tujuannya adalah agar perputaran roda perekonomian tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan material dalam jangka pendek, tetapi sekaligus sebagai titik tolak untuk membangun sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang didasarkan atas prinsip demokratisasi modal atau penguasaan factor-faktor produksi itulah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.²⁴

²³ Revrisond Baswir, *Sistem Ekonomi Kerakyatan*, disampaikan dalam seminar sehari mengenang wafatna Bung Hatta, *Ekonomi Kerakyatan: Pemikiran Hatta dan Kecenderungan Dewasa ini*, Tanggal 18 Maret 2000 di gedung Auditorium Widya Graha UMS Surakarta, hlm. 6.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

Pengembangan ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan strategi pertumbuhan. Telah terbukti bahwa dampak kebijakan yang hanya mengandalkan pertumbuhan, justru semakin memperlebar jurang kesenjangan. Karena itulah strategi pembangunan ekonomi kita bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu: pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta pemerataan pembangunan.

Menurut Gunawan Sumodiningrat, upaya pengembangan ekonomi rakyat dengan demikian perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural²⁵ (*strukturadjustment* atau *struktur transformation*) yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, serta pemberdayaan sumber daya manusia.²⁶

Dalam pandangan Dawam Raharjo, sistem ekonomi Islam tinjauan normatif harus melakukan adanya *Islamisasi* ilmu ekonomi, yang kemudian hasilnya bias melahirkan sebuah system ekonomi

²⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 6.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

Islam, yaitu suatu bentuk pengaturan kegiatan ekonomi menurut prinsip-prinsip Islam. Tujuan maupun cara-cara penggunaan alat-alat untuk mencapainya itu perlu disesuaikan dengan ciri-ciri Islam sebagai suatu cara dan pandangan hidup. Kegiatan ekonomi menurut Islam, tidak bisa diatur hanya berdasarkan keinginan dan pengalaman manusia saja. Tuhan melalui wahyu-Nya telah memberikan pedoman yang kemudian dirumuskan para ulama menjadi syari'ah. Kegiatan ekonomi perlu diatur berdasarkan wahyu yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.²⁷

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi keseimbangan diterapkan dalam segala segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen dan antara golongan-golongan dan masyarakat.²⁸

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini tetapi suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang

²⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Said Tuhuleley, *al-Qur'an dan Tantangan Modernitas dalam Dawam Raharjo, Etika Ekonomi dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Sipres, 1996), hlm.47.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.33.

didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Ekonomi kerakyatan yang mayoritas dijalani oleh rakyat Indonesia adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini harus bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.²⁹ Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan makmur dan mendapat ridha dari Allah SWT.

3. Kemandirian

Pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, ketrampilan, kreatifitas, disiplin, profesionalisme serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kemampuan manajemen.

Melalui proses tersebut, ingin dibangun manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri. Kemajuan tercermin dari makin tingginya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta dimilikinya nilai prestasi.

Kemandirian masyarakat diartikan sebagai kemampuan masyarakat dengan kekuatan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain untuk manajemen, dan merumuskan serta memecahkan masalah

²⁹ *Ibid.*, hlm.31.

yang dihadapinya. Di sini mencakup strategi dan memilih alternatif-alternatif yang diperlukan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, kemandirian akan dapat tercapai dengan adanya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat. Adanya sikap kemandirian masyarakat akan mengurangi ketergantungan terhadap segala bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama ini, sehingga meskipun program bantuan telah dihentikan, mereka masih berswadaya dengan memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat.

Menurut Ginandjar Kartasasmita, salah satu ciri dari masyarakat yang mandiri adalah peran serta masyarakat yang tinggi dalam pembangunan. Masyarakat akan makin terbuka, makin berpendidikan dan makin tinggi kesadarannya. Dengan demikian, juga makin tanggap dan kritis terhadap hal yang menyangkut kehidupannya. Dalam masyarakat yang makin maju dan makin modern, rakyat tidak puas dengan hanya mendengar dan melaksanakan petunjuk, tetapi ingin turut menentukan nasibnya sendiri (mandiri).³⁰

Kemandirian masyarakat akan tercermin dari sikap dan kemampuan masyarakat, kelompok atau suatu bangsa dalam menghadapi tantangan dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada dalam diri dan lingkungan masyarakat sekitarnya, serta mampu menentukan apa yang terbaik bagi dirinya (masyarakat). Bangsa yang

³⁰ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Ciderindo, 1996), hlm.349.

maju dan mandiri hanya mungkin terbentuk dari kualitas manusia, masyarakatnya, kekukuhan ekonomi, dan ketahanan nasionalnya.³¹

F. Metode Penelitian

1. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.³² Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau dikenal dengan istilah *informan* yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian ini adalah orang yang mempunyai usaha konveksi beserta para karyawannya, masyarakat Mlangi dan tokoh Agama.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah tentang usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat secara mandiri di dusun Mlangi.

2. Alat Pengumpulan Data

Yang dimaksud alat pengumpulan data adalah cara-cara yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap obyektif dan dapat

³¹ *Ibid.*, hlm.288.

³² Suharismi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.115

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *Interview* adalah metode yang mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.³³

Wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.³⁴ Dalam interview ini selalu terdiri dari dua pihak, yang satu berada pada kedudukan pencari dan lainnya sebagai pemberi informasi. Metode ini saya gunakan dalam rangka memperoleh data yang primer dan utama. Metode ini sangat penting karena tanpa wawancara, penelitian ini akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden.³⁵

Wawancara bebas terpimpin, menurut Sutrisno Hadi, dalam wawancara ini pewawancara membawa kerangka-kerangka

³³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1991), hlm.129.

³⁴ Sapari Imam Asy'ari, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm.82.

³⁵ Masri Singarimbun, *Teknik Wawancara*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.192.

pertanyaan untuk disajikan, akan tetapi bagaimana cara pertanyaan itu diajukan semuanya diserahkan kepada pewawancara.³⁶ Wawancara ini diharapkan bisa berkembang karena dalam penyampaianya bersifat longgar tanpa keluar dari pedoman yang dipakai melalui wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan hanya membuat garis besar yang ditanyakan. Dengan metode ini, peneliti menginginkan beberapa pertanyaan responden yang telah dipilih, untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat secara mandiri yang dilakukan konveksi Amalia terhadap masyarakat Mlangi.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.³⁷

Adapun jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi peneliti di dalam kegiatan-kegiatan yang dijadikan obyek dan subyek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap proses pemberdayaan ekonomi masyarakat

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm.203.

³⁷ *Ibid.*, hlm.36.

secara mandiri melalui usaha konveksi Amalia di dusun Mlangi, kemudian mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Melalui observasi, peneliti juga memperhatikan atau mengamati orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan. Pengamatan ini juga diarahkan pada suasana dan interaksi dalam proses kegiatan ketika kegiatan tersebut sedang berlangsung. Diantaranya ketika pengusaha dengan para karyawannya berinteraksi mengenai bahan baku berupa kain batik dan kain biasa mau dibuat jenis model pakaian apa, interaksi antara pengusaha dengan masyarakat yang ikut memasarkan atau menjualkan barang-barang hasil konveksi.

c. Metode Dokumentasi

Selain metode wawancara dan pengamatan, data penelitian juga dikumpulkan melalui pengkajian dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti arsip-arsip surat, data statistik, laporan-laporan penelitian terdahulu, catatan-catatan, foto serta laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut dipergunakan sebagai data tambahan untuk melengkapi data penelitian. Sehingga dengan data yang dijaring melalui

metode dokumentasi ini mampu melengkapi serta memperkuat pengungkapan dan pemaknaan tentang masalah penelitian.

d. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dengan menganalisa akan diperoleh gambaran sistematis mengenai isi suatu wawancara, observasi, dokumentasi yang telah dilakukan. Data yang diperoleh tersebut diteliti isinya kemudian diklasifikasi menurut kriteria atau pola tertentu, oleh karena itu seperti yang diungkapkan Bugdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁸

Dengan demikian, yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, adalah memperoleh kebenaran data yang dapat dilakukan dengan cara memperpanjang masa pengamatan, melakukan pengamatan secara terus-menerus, melakukan pengecekan terhadap hasil pengamatan dan mengeksplorasi hasil akhir penelitian dalam diskusi khusus untuk membahas tentang keabsahan data, deskripsi hasil penelitian dan kesimpulan serta saran-saran.³⁹

³⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.3.

³⁹ *Ibid.*, hlm.132.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian setelah melakukan penelitian dan penguraian secara apa adanya penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat secara mandiri yang dilakukan konveksi Amalia di dusun Mlangi, desa Nogotirto, kecamatan Gamping, kabupaten Sleman, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kegiatan produksinya bisa berjalan dan berhasil karena didorong oleh faktor-faktor seperti tokoh agama setempat, sikap etos kerja yang tinggi, kondisi sosial budaya yang kondusif, kondisi ekonomi, serta dorongan keluarga.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui konveksi Amalia yang dilakukan oleh pengusaha konveksi, para karyawan dan masyarakat secara mandiri dalam hal pengadaan bahan baku, modal usaha, ketrampilan (skill), produksi serta pemasaran dilakukan secara sendiri (mandiri) oleh ketiga unsur yaitu pengusaha, karyawan dan masyarakat tanpa melalui perantara lembaga atau pemerintah.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat secara mandiri yang dilakukan konveksi Amalia di Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta telah ikut berperan di dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di daerah khususnya Mlangi dan masyarakat luar Mlangi pada umumnya, serta meningkatkan pendapatan masyarakat di bidang ekonomi.

B. Saran-saran

1. Usaha pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh warga dusun Mlangi, Nogotirto, gamping Sleman, Yogyakarta dengan sikap ulet, etos kerja, dan jiwa kemandiriannya perlu dicontoh dan ditiru oleh warga masyarakat Yogyakarta pada khususnya dan warga masyarakat Indonesia pada umumnya dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki masing-masing individu, di segala bidang kehidupan bermasyarakat yang bertujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan warga masyarakat.
2. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan dan memperhatikan pengusahaan-pengusaha kecil seperti konveksi Amalia yang berada di dusun Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta supaya bisa berkembang lebih baik lagi, dengan memberikan dan mempermudah pinjaman modal, memberikan pengarahan atau kursus-kursus yang berkaitan dengan masalah usaha konveksi serta ikut membantu dalam memasarkan dan mencari peluang-peluang pemasaran (*ekspor*) sehingga bisa berkembang.

C. Penutup

Tiada kata yang paling pantas dan terindah untuk diucapkan selain puji syukur ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat secara Mandiri melalui Usaha Konveksi Amalia di

Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman. Upaya maksimal telah penulis curahkan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Karya ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan sebagaimana yang dimiliki penulisnya sendiri sebagai insan biasa. Oleh karena itu penulis terbuka untuk kritik konstruktif, saran dan masukan dari para pembaca demi penyempurnaan karya ini dan karya-karya selanjutnya. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, dkk., *Agama dan Kewiraswastaan Kaum Santri: Studi Tentang Perilaku Kaum Santri di Pedesaan Yogyakarta*, Yogyakarta: LP3M, 1996.
- Arief, Sritua, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Asyari, Imam Sapari, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Asy'arie Musa, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1997.
- Baswir, Revrison, *Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Disampaikan dalam seminar sehari mengenang wafatnya Bung Hatta, *Ekonomi Kerakyatan: Pemikiran Hatta dan Kecenderungan Dewasa ini*, Pada tanggal 18 Maret 2000 di gedung Auditorium Widya Graha, Dalam program Magister Manajemen UMS Surakarta.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1987.
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Kartasmita, Ginandjar, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1991.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I dan Said Tuhuleuy, *al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, dalam Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Sypress, 1996.

- Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung: Rosda, 2001.
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- , *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Nugroho, Adi, *Kamus Pengantar Umum*, Cet II, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.
- Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prijino, Onny S & A.M.W.Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Romdlon, *Kepercayaan Masyarakat Jawa*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1973.
- Singarimbun, Masri, *Tekhnik Wawancara*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sutarto, *Monografi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: P & K, 1953
- Tampubolon, Magatas, *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*, Dalam Makalah, 2000.
- Yustika, Ahmad Erani, *Industrialisasi Pinggiran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.